Tunas Cendekia: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini
P-ISSN 2622-0849 E-ISSN 2654-6051
Website: https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/tunascendekia
DOI: https://doi.org/10.24256/tunascendekia.v9i2.12148
Vol. 9, No. 2, 2026, hlm. 1195-1210

Analisis Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Lembaga PAUD Swasta

Chairani Agustina[1], Hermanto[2], Pujaningsih[3]
[1,2,3] Program Studi Magister Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada Lembaga PAUD Swasta di Kecamatan Sangatta Utara, serta penjabaran mengenai faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif. penelitian ini perlu dilakukan agar kendala yang ada pelaksanaan dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan, sehingga peningkatan kualitas pembelajaran inklusif lebih baik lagi ke depannya. Metode penelitian merupakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Sumber data yaitu primer dan sekunder, pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam, observasi serta studi pustaka, fokus penelitian terdiri dari, kebijakan pendidikan inklusif dengan peningkatan kemampuan guru ABK, kebijakan pendidikan inklusif dengan pelatihan, kebijakan pendidikan inklusif dengan penyesuaian materi serta kebijakan pendidikan inklusif mengenai evaluasi fasilitas fisik. Adapun teknik analisis data menggunakan konsep dari Miles dan Hubberman yaitu model interkatif. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Lembaga PAUD Swasta di Kecamatan Sangatta Utara yang terdiri dari: kebijakan dengan peningkatan kemampuan guru ABK, kebijakan melalui pelatihan guru, kebijakan dengan penyesuaian materi, dan kebijakan dengan evaluasi kebijakan. Dari empat implementasi kebijakan tersebut semuanya sudah diterapkan di sekolah TK dan PAUD pada lembaga swasta, hanya saja penyelenggaraannya kurang maksimal, hal tersebut disebabkan adanya kendala dalam penerapannya. Adapun faktor yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif terdiri dari: Komitmen dan sikap positif guru, dukungan dari pihak sekolah, Kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga profesional, Pola pikir atau pandangan (mindset) tentang ABK secara positif dan Peraturan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Pendidikan Inklusi. Sedangkan faktor yang menghambat implementasi kebijakan yaitu: terbatasnya guru pendamping, Anggaran dana yang terbatas, Belum ada instrumen evaluasi yang konsisten untuk menilai keberhasilan implementasi inklusi, fasilitas dan sarana pendukung pendidikan inklusif terbatas.

Kata Kunci: implementasi kebijakan; pendidikan inklusif; lembaga PAUD swasta

Abstract

This study aims to determine how the Inclusive Education Policy is implemented in private early childhood education institutions in North Sangatta District, as well as to describe the supporting and inhibiting factors in the implementation process of the inclusive education policy. This research is necessary to evaluate and improve existing implementation obstacles, thus improving the quality of inclusive learning in the future. The research method is a qualitative descriptive approach. Data sources are primary and secondary, data collection through in-depth interviews, observation, and literature review. The focus of the research consists of inclusive education policies with improving the skills of teachers with special needs, inclusive education policies with training, inclusive education policies with material adjustments, and inclusive education policies regarding the evaluation of physical facilities. The data analysis technique uses the concept of Miles and Hubberman, namely the interactive model. The results of the study show that the Implementation of Inclusive Education Policy in Private Early Childhood Education Institutions in North Sangatta District consists of: policies with increased ability of teachers with special needs, policies through teacher training, policies with material adjustments, and policies with policy evaluation. Of the four policy implementations, all have been implemented in kindergarten and early childhood education schools in private institutions, only the implementation is less than optimal, this is due to obstacles in its implementation. The factors that support the implementation of inclusive education policies consist of: Commitment and positive attitudes of teachers, support from the school, Collaboration between teachers, parents, and professional staff, Positive mindset or views about special needs and Government regulations or policies related to Inclusive Education. While the factors that hinder the implementation of the policy are: limited accompanying teachers, Limited budget, There is no consistent evaluation instrument to assess the success of the implementation of inclusion, limited facilities and supporting means of inclusive education.

Keywords: *policy implementation; inclusive education; private early childhood education institutions*

Corresponding Author
Chairani Agustina, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Email: chairaniagustina.2025@student.uny.ac.id

Article Information
Received : 1 July 2026
Accepted : 14 August 2026
Published : 16 August 2026

© 2026 Tunas Cendekia: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. This article is published under the Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus instrumen utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Verma dkk., 2023). Melalui pendidikan yang bermutu, setiap individu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kompetensi,

serta berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pembaruan kebijakan, penguatan layanan pendidikan, serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan inklusif, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) atau penyandang disabilitas, untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya di sekolah reguler sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing (Sudarto, 2016). Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menjamin hak memperoleh pendidikan yang setara, tetapi juga membangun lingkungan belajar yang menghargai keberagaman, mendorong partisipasi seluruh peserta didik, serta menghilangkan praktik diskriminasi dalam dunia pendidikan.

Implementasi pendidikan inklusif memiliki arti penting sejak jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pada fase ini, perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan bahasa anak berlangsung sangat pesat sehingga membutuhkan layanan pendidikan yang mampu mengakomodasi keberagaman kemampuan setiap anak. Pendidikan inklusif pada jenjang PAUD juga berperan dalam menanamkan nilai toleransi, empati, dan penerimaan terhadap perbedaan sejak usia dini. Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada PAUD menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kajian tinjauan sistematis dan meta-analisis menunjukkan bahwa pendidikan inklusif memberikan dampak positif signifikan terhadap perkembangan anak usia dini, termasuk pada aspek kognitif, sosial, dan emosional (Wang dkk., 2025), serta bahwa penerapan model pendidikan inklusif pada jenjang PAUD perlu disesuaikan dengan konteks dan karakteristik masing-masing lembaga (Nelis dkk., 2023). Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada lembaga PAUD swasta. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif masih terkendala oleh keterbatasan guru yang memiliki kompetensi pendidikan khusus, minimnya guru pendamping khusus (GPK), belum memadainya sarana dan prasarana yang aksesibel, terbatasnya media pembelajaran yang adaptif, serta belum optimalnya dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap lembaga penyelenggara pendidikan inklusif (Utari, 2021). Kondisi tersebut menyebabkan kualitas layanan pendidikan inklusif belum terlaksana secara optimal. Temuan ini sejalan dengan tinjauan literatur global yang mengidentifikasi keterbatasan guru terlatih, sarana yang tidak aksesibel, serta lemahnya dukungan kebijakan sebagai hambatan utama pendidikan inklusif di berbagai negara (Bani Odeh & Lach, 2024).

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada lembaga PAUD swasta di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil observasi awal, implementasi kebijakan pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, sebagian besar lembaga PAUD swasta belum memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) yang memadai sehingga guru reguler harus menangani peserta didik berkebutuhan khusus tanpa didukung kompetensi pendidikan khusus yang memadai. Kedua, sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus masih terbatas. Ketiga, pelaksanaan pendidikan inklusif belum didukung secara optimal melalui penyediaan fasilitas, pendampingan teknis, maupun pembinaan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif melalui berbagai program, seperti peningkatan kompetensi guru melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), pengembangan sekolah inklusif, serta upaya penyediaan guru yang memiliki kompetensi pendidikan khusus. Namun demikian,

implementasi berbagai kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh lembaga PAUD swasta sehingga masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan semacam ini juga banyak ditemukan secara global, di mana kebijakan pendidikan inklusif kerap dirumuskan tanpa disertai mekanisme implementasi dan pemantauan yang memadai di tingkat satuan pendidikan (Hardy & Woodcock, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana, pembiayaan, serta koordinasi antar pemangku kepentingan (Irmawati dkk., 2024). Hal ini sejalan dengan kajian kebijakan publik yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses, konteks, dan interaksi antaraktor yang terlibat, bukan semata-mata oleh isi regulasi itu sendiri (Winarno, 2016). Studi di berbagai negara juga menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan inklusif sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dimaknai dan disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing sekolah (Ainscow, 2020), serta bahwa faktor pendukung seperti komitmen pemerintah dan regulasi yang jelas maupun faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya turut menentukan keberhasilan implementasinya (Komabu-Pomeyie, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada lembaga PAUD swasta, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian mengenai pendidikan inklusif pada jenjang PAUD telah dilakukan dalam berbagai konteks. Insiatun et al. (2021) mengkaji pelaksanaan dan hambatan pendidikan inklusif di PAUD Kota Bandung, sedangkan Fatmawiyati dan Permata (2023) menelaah implementasinya berdasarkan kurikulum, pembelajaran, sarana prasarana, sumber daya manusia, keterlibatan orang tua, dan evaluasi. Raniyah dan Masitah (2025) menemukan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di TK ABA Kota Kisaran. Namun, kajian mengenai implementasi kebijakan pada PAUD swasta di tingkat lokal masih terbatas (Mendoza & Heymann, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada PAUD swasta di Kecamatan Sangatta Utara, termasuk hambatan sumber daya manusia, pendanaan, fasilitas, dan dukungan pemangku kepentingan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan layanan bagi anak berkebutuhan khusus.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif (Sugiyono, 2018) untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada lembaga PAUD swasta di Kecamatan Sangatta Utara. Desain kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian berfokus pada penggambaran proses implementasi kebijakan sebagaimana berlangsung dalam kondisi alamiah di satuan pendidikan, termasuk bentuk pelaksanaan, kesiapan lembaga, serta faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan di lapangan. Penelitian dilaksanakan di beberapa lembaga PAUD swasta di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang telah menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan bahwa lembaga yang dipilih telah memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus sehingga memiliki pengalaman empiris yang relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru kelas, dan mitra sekolah yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Observasi dilakukan untuk

memperoleh gambaran mengenai kondisi penyelenggaraan pendidikan inklusif, proses pembelajaran, lingkungan belajar, serta berbagai kendala yang dihadapi lembaga. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, kesiapan lembaga dan pendidik, bentuk layanan yang diberikan, serta faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa dokumen sekolah, foto kegiatan, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (human instrument) yang terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan interpretasi data. Instrumen pendukung yang digunakan meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, alat tulis, dan perangkat perekam suara. Pedoman pengumpulan data disusun berdasarkan fokus penelitian yang mencakup deteksi dini dan asesmen, kesiapan dan kompetensi pendidik, adaptasi kurikulum dan metode pembelajaran, serta penyediaan sarana dan lingkungan belajar yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Fokus tersebut disusun dengan mengacu pada panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diterbitkan oleh pemerintah (Arriani dkk., 2022).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking (Noble & Heale, 2019). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah, guru kelas, dan mitra sekolah, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali informasi dan interpretasi tertentu kepada informan untuk memastikan kesesuaiannya dengan data yang diberikan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (lihat juga Wijaya, 2018). Analisis dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai. Data diorganisasikan dan dikondensasi berdasarkan fokus penelitian, kemudian dikelompokkan ke dalam kategori dan tema yang relevan. Selanjutnya, data disajikan secara naratif untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, dan hubungan antartemuan. Kesimpulan ditarik secara bertahap dan diverifikasi dengan membandingkan berbagai sumber serta teknik pengumpulan data sehingga diperoleh gambaran yang kredibel mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada lembaga PAUD swasta di Kecamatan Sangatta Utara.

3. Hasil

Berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pada lembaga PAUD swasta yang menjadi lokasi penelitian, penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kecamatan Sangatta Utara menunjukkan adanya upaya dari masing-masing lembaga untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan peserta didik. Lembaga yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini meliputi TK IT Daarussalam, TK Annur, TK YPPSB, dan PAUD Prima Adinda. Keempat lembaga tersebut telah memberikan layanan kepada peserta didik dengan kebutuhan yang beragam serta melakukan sejumlah penyesuaian dalam penyelenggaraan pembelajaran. Data yang diperoleh dari lembaga-lembaga tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan fokus penelitian yang mencakup deteksi dini dan asesmen, kesiapan dan kompetensi pendidik, adaptasi kurikulum dan metode pembelajaran, serta

penyediaan sarana dan lingkungan belajar yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Hasil analisis juga digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang dihadapi lembaga PAUD swasta dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif di Kecamatan Sangatta Utara.

3.1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Lembaga PAUD Swasta di Kecamatan Sangatta Utara

Pendidikan inklusif merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi, termasuk bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada lembaga PAUD swasta di Kecamatan Sangatta Utara telah mulai dilaksanakan melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Bentuk implementasi tersebut meliputi peningkatan kompetensi guru, pelatihan dan pengembangan profesional, penyesuaian kurikulum melalui pembelajaran berdiferensiasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran inklusif. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemerataan kompetensi guru dan keterbatasan fasilitas pendukung.

Peningkatan kompetensi guru merupakan langkah awal yang dilakukan dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif. Kompetensi guru sangat menentukan keberhasilan pembelajaran karena guru menjadi pihak yang secara langsung melakukan identifikasi kebutuhan peserta didik, merancang pembelajaran, serta memberikan layanan sesuai karakteristik anak. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala TK IT Daarussalam menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memberikan kesempatan kepada guru PAUD swasta untuk mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi di bidang pendidikan inklusif agar mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta didik berkebutuhan khusus.

"Melalui program Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, pemerintah memberikan kesempatan kepada guru-guru swasta untuk meningkatkan kompetensi, khususnya di bidang pendidikan inklusi.... Pelatihan dan peningkatan skill perlu terus ditingkatkan agar kemampuan guru dalam menangani anak didasarkan pada ilmu yang diperoleh." (Kepala TK IT Daarussalam, Wawancara, 29 Mei 2026).

Pendapat tersebut diperkuat oleh Kepala TK Annur yang menjelaskan bahwa peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui berbagai program pendidikan lanjutan dan penguatan kemampuan dalam menangani keberagaman peserta didik.

"Kebijakan pendidikan inklusif pada lembaga dilaksanakan melalui Program Beasiswa Indonesia Emas-Daerah dan Program RPL Kutim bagi guru PAUD. Guru juga didorong untuk mengidentifikasi kebutuhan anak, menyusun pembelajaran yang fleksibel, serta menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi." (Kepala TK Annur, Wawancara, 29 Mei 2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru telah menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kecamatan Sangatta Utara. Namun demikian, pelaksanaannya masih belum merata sehingga belum seluruh guru memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan maupun pendidikan lanjutan. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas guru masih memerlukan dukungan pemerintah daerah secara berkelanjutan agar kualitas layanan pendidikan inklusif dapat terus meningkat. Selain peningkatan kompetensi formal, implementasi kebijakan juga diwujudkan melalui pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan orientasi guru mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan asesmen awal, menyusun pembelajaran berdiferensiasi, serta mengelola kelas yang memiliki karakteristik peserta didik yang beragam. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala TK YPPSB bahwa pelaksanaan pelatihan pendidikan inklusif sudah mulai berjalan, meskipun intensitasnya masih terbatas.

"Pelatihan yang berkaitan dengan pendidikan inklusif dan penanganan anak berkebutuhan khusus sudah mulai dilaksanakan, baik oleh Dinas Pendidikan maupun inisiatif lembaga. Akan tetapi pelaksanaannya masih terbatas sehingga belum semua guru memperoleh kesempatan yang sama." (Kepala TK YPPSB, Wawancara, 29 Mei 2026).

Hal serupa disampaikan oleh Kepala PAUD Prima Adinda yang menjelaskan bahwa selain mengikuti pelatihan, guru juga terus mengembangkan keterampilan dalam melakukan identifikasi awal terhadap anak serta menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi.

"Guru dihadapkan pada peningkatan keterampilan dalam mengidentifikasi dan asesmen anak sejak awal masuk sekolah. Guru juga memodifikasi materi sesuai kemampuan anak melalui pembelajaran berdiferensiasi agar seluruh peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik." (Kepala PAUD Prima Adinda, Wawancara, 30 Juli 2025).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelatihan memberikan dampak positif terhadap kesiapan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran inklusif. Namun, keberlanjutan program pelatihan masih menjadi tantangan karena belum seluruh guru memperoleh kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan frekuensi dan pemerataan pelatihan agar seluruh guru PAUD swasta memiliki kompetensi yang setara dalam memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh lembaga PAUD swasta telah melakukan penyesuaian materi pembelajaran sesuai kemampuan peserta didik. Penyesuaian dilakukan melalui penyederhanaan materi, penggunaan media pembelajaran yang lebih konkret, pemberian waktu belajar yang fleksibel, serta penerapan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar masing-masing anak.

Kepala TK Annur menjelaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pada berbagai aspek sehingga setiap peserta didik memperoleh layanan sesuai kebutuhannya.

"Guru melakukan modifikasi terhadap isi, kedalaman, dan penyajian materi sesuai tahap perkembangan anak. Diferensiasi diterapkan pada konten, proses, produk, dan lingkungan belajar sehingga setiap anak memiliki kesempatan berkembang sesuai potensinya." (Kepala TK Annur, Wawancara, 29 Mei 2026).

Pendapat tersebut diperkuat oleh Kepala PAUD Prima Adinda yang menyatakan bahwa materi pembelajaran disederhanakan tanpa mengurangi tujuan pembelajaran serta disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik.

"Materi lebih disederhanakan agar mudah dipahami ABK. Guru menggunakan media gambar, audio, video, serta memberikan waktu belajar yang lebih panjang sesuai kemampuan anak." (Kepala PAUD Prima Adinda, Wawancara, 30 Juli 2025).

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pembelajaran berdiferensiasi telah berjalan dengan baik pada seluruh lembaga yang menjadi lokasi penelitian. Meskipun bentuk

penyesuaian berbeda pada setiap sekolah, seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik sesuai karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing. Aspek yang masih menghadapi kendala terbesar dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif adalah penyediaan fasilitas fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga PAUD swasta belum memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus karena keterbatasan anggaran dan kondisi bangunan sekolah. Kepala TK IT Daarussalam mengungkapkan bahwa sebagian PAUD swasta masih menggunakan bangunan sewa sehingga sulit melakukan penyesuaian fasilitas sesuai standar pendidikan inklusif.

"Sebagian PAUD swasta masih menempati rumah kontrakan sehingga sulit melakukan perombakan struktur bangunan. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam penyediaan fasilitas pendukung bagi anak berkebutuhan khusus." (Kepala TK IT Daarussalam, Wawancara, 29 Mei 2026).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada aspek fasilitas fisik belum terlaksana secara optimal. Sebagian besar lembaga telah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, namun keterbatasan anggaran menyebabkan penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus belum dapat dipenuhi secara menyeluruh. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan inklusif masih sangat diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara lebih efektif.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif pada Lembaga PAUD Swasta di Kecamatan Sangatta Utara

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada lembaga PAUD swasta di Kecamatan Sangatta Utara belum sepenuhnya berjalan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung maupun faktor penghambat yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari internal lembaga pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan pemerintah daerah, orang tua, serta ketersediaan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyampaikan bahwa faktor pendukung utama implementasi kebijakan pendidikan inklusif adalah komitmen pemerintah daerah, kompetensi guru, regulasi yang mendukung, serta kolaborasi antara sekolah dengan orang tua maupun tenaga profesional. Kepala TK IT Daarussalam menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan pemerintah daerah melalui berbagai program penguatan kapasitas sekolah.

"Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif terdiri dari komitmen Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, regulasi yang jelas, keterbukaan dan sikap positif guru serta pengelola sekolah, dan dukungan orang tua maupun masyarakat. Untuk mewujudkan pendidikan inklusif diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara dinas pendidikan, yayasan, orang tua, dunia usaha, dan tenaga profesional." (Kepala TK IT Daarussalam, Wawancara, 29 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif tidak dapat dilaksanakan hanya oleh sekolah, tetapi membutuhkan sinergi berbagai pemangku

kepentingan. Dukungan pemerintah melalui regulasi, pelatihan, dan supervisi menjadi dasar penting bagi sekolah dalam mengembangkan layanan pendidikan inklusif. Di sisi lain, keterlibatan orang tua, yayasan, dan tenaga profesional turut memperkuat keberhasilan pelaksanaan program karena kebutuhan anak berkebutuhan khusus memerlukan penanganan secara kolaboratif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kompetensi guru menjadi faktor pendukung yang paling dominan. Guru yang memiliki pemahaman mengenai pendidikan inklusif lebih mampu melakukan identifikasi kebutuhan peserta didik, menyusun pembelajaran berdiferensiasi, serta memberikan layanan sesuai karakteristik anak. Kepala TK Annur menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan didukung oleh komitmen guru, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, serta kolaborasi antara sekolah dengan orang tua dan tenaga profesional.

"Faktor yang mendukung terdiri dari komitmen dan sikap positif guru serta kepala sekolah, dukungan kebijakan sekolah, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis, ketersediaan media pembelajaran, serta kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga profesional." (Kepala TK Annur, Wawancara, 29 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusif sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik dan pemahaman mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus cenderung lebih mampu menciptakan pembelajaran yang adaptif, sedangkan dukungan kepala sekolah berperan dalam memastikan tersedianya kebijakan internal, supervisi, serta pengembangan profesional guru secara berkelanjutan.

Di samping berbagai faktor pendukung tersebut, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat yang masih dihadapi lembaga PAUD swasta. Kendala yang paling banyak disampaikan oleh informan meliputi keterbatasan guru pendamping khusus (GPK), rendahnya kompetensi sebagian guru dalam pendidikan inklusif, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya anggaran, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi kebijakan belum dapat berjalan secara maksimal pada seluruh lembaga.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala PAUD Prima Adinda yang menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

"Faktor yang menghambat yaitu terbatasnya guru pendamping (shadow teacher), belum semua sekolah memiliki fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, anggaran yang masih terbatas, minimnya kolaborasi berbagai pihak, serta belum adanya instrumen evaluasi yang konsisten untuk menilai keberhasilan implementasi pendidikan inklusi." (Kepala PAUD Prima Adinda, Wawancara, 29 Mei 2026).

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan fasilitas fisik masih menjadi hambatan yang paling nyata. Sebagian besar lembaga PAUD swasta belum memiliki ruang belajar yang sepenuhnya aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk belum tersedianya jalur khusus, media pembelajaran adaptif, maupun fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan sekolah belum mampu menyediakan guru pendamping khusus maupun mengikuti pelatihan secara berkelanjutan. Di sisi lain, masih terdapat sebagian

masyarakat yang memiliki persepsi negatif terhadap anak berkebutuhan khusus sehingga memengaruhi proses implementasi pendidikan inklusif di lingkungan sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada lembaga PAUD swasta di Kecamatan Sangatta Utara telah memperoleh dukungan yang cukup baik melalui komitmen pemerintah daerah, regulasi, kompetensi guru, kolaborasi dengan orang tua, serta sikap positif seluruh warga sekolah. Namun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas yang aksesibel, keterbatasan anggaran operasional, belum optimalnya instrumen evaluasi, serta belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai pendidikan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas guru, penyediaan sarana prasarana yang ramah disabilitas, penambahan tenaga pendamping khusus, serta penguatan kemitraan antara sekolah, keluarga, dan berbagai pemangku kepentingan agar implementasi pendidikan inklusif dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada lembaga PAUD swasta di Kecamatan Sangatta Utara telah berjalan, meskipun tingkat implementasinya belum sepenuhnya optimal. Implementasi kebijakan diwujudkan melalui empat aspek utama, yaitu peningkatan kompetensi guru, penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan profesional, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan inklusif. Keempat aspek tersebut saling berkaitan karena keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, dan lingkungan belajar yang mampu mengakomodasi keberagaman peserta didik. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa peningkatan kompetensi guru menjadi aspek yang paling dominan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

Guru pada empat lembaga PAUD swasta yang menjadi sumber data penelitian, yaitu TK IT Daarussalam, TK Annur, TK YPPSB, dan PAUD Prima Adinda, telah memperoleh berbagai bentuk penguatan kompetensi melalui pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis, maupun pendidikan lanjutan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penguatan kompetensi tersebut mendukung kemampuan guru dalam melakukan identifikasi awal terhadap kebutuhan peserta didik, melakukan pemantauan dan asesmen perkembangan, serta merancang pembelajaran yang lebih adaptif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas pendidik sebagai pelaksana utama layanan pembelajaran di kelas. Kompetensi guru menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif karena berkaitan dengan kemampuan pendidik dalam mengakomodasi keberagaman peserta didik, melakukan penyesuaian pembelajaran, serta membangun lingkungan belajar yang memberikan kesempatan berpartisipasi bagi seluruh anak. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas implementasi pendidikan inklusif pada lembaga PAUD swasta.

Selain kompetensi guru, pelatihan dan pengembangan profesional menjadi bentuk implementasi kebijakan yang cukup efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan guru mengenai pendidikan inklusif, tetapi juga mengubah cara pandang guru dalam memperlakukan keberagaman peserta didik. Guru menjadi lebih mampu menyusun strategi pembelajaran yang fleksibel, menerapkan asesmen secara berkelanjutan, serta membangun komunikasi yang lebih efektif dengan orang tua maupun tenaga profesional lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk budaya sekolah yang lebih inklusif. Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori konstruktivisme sosial yang dikemukakan oleh Vygotsky (1978), yang menekankan bahwa perkembangan kognitif dan proses belajar berlangsung melalui interaksi sosial serta dukungan dari individu yang lebih kompeten dalam *zone of proximal development* (ZPD). Dalam konteks pendidikan inklusif, guru berperan dalam memberikan dukungan pembelajaran secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak. Penguatan kompetensi melalui pelatihan membantu guru mengenali kebutuhan peserta didik serta menentukan bentuk bantuan dan strategi pembelajaran yang lebih adaptif. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kesiapan dan sikap positif guru PAUD terhadap keberagaman peserta didik menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif (Zabeli & Gjelaj, 2020), bahwa efikasi diri pendidik anak usia dini berkaitan erat dengan sikap mereka terhadap inklusi anak berkebutuhan khusus (Schaub & Lütolf, 2023), dan bahwa hasil meta-analisis lintas negara menegaskan hubungan yang kuat antara efikasi diri guru dan sikap terhadap pendidikan inklusif (Yada dkk., 2022), serta bahwa peran aktif pendidik dan dukungan kebijakan sekolah sangat menentukan kualitas layanan bagi anak berkebutuhan khusus di jenjang sekolah dasar (Saidah dkk., 2025). Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung kualitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Implementasi kebijakan juga terlihat pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Empat lembaga PAUD yang menjadi lokasi penelitian telah melakukan penyesuaian materi, metode pembelajaran, media, maupun bentuk penilaian berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Meskipun mekanisme yang diterapkan pada setiap lembaga berbeda, penyesuaian tersebut diarahkan untuk memberikan kesempatan belajar yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan setiap anak. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip keadilan (equity), yaitu pemberian dukungan berdasarkan kebutuhan peserta didik, bukan sekadar memberikan perlakuan yang sama (equality) kepada seluruh anak. Prinsip tersebut sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi sangat bergantung pada penguatan kompetensi guru sejak masa persiapan maupun pengembangan profesional berkelanjutan (Langelaan dkk., 2024), serta bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi secara konsisten terbukti mendukung capaian belajar peserta didik dengan kemampuan yang beragam (Ziernwald dkk., 2022).

Pembelajaran berdiferensiasi juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah bergerak dari pendekatan administratif menuju implementasi yang lebih berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Guru tidak lagi menyampaikan materi secara seragam kepada seluruh peserta didik, tetapi melakukan penyesuaian terhadap isi materi, proses pembelajaran, produk pembelajaran, serta lingkungan belajar agar setiap peserta didik memperoleh kesempatan untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Temuan tersebut

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif telah mendorong praktik pembelajaran yang lebih responsif terhadap keberagaman peserta didik pada lembaga PAUD swasta. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana masih menjadi salah satu kelemahan dalam implementasi kebijakan. Sebagian besar lembaga PAUD swasta belum memiliki fasilitas yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan aksesibilitas anak berkebutuhan khusus, seperti jalur landai, ruang layanan khusus, media pembelajaran adaptif, maupun toilet yang aksesibel. Keterbatasan tersebut terutama berkaitan dengan kemampuan anggaran operasional lembaga serta kondisi sebagian bangunan sekolah yang masih menggunakan gedung sewa sehingga penyesuaian fisik sulit dilakukan secara optimal. Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori sistem ekologi Bronfenbrenner (1979), yang menempatkan lingkungan terdekat anak (*microsystem*), termasuk keluarga dan sekolah, sebagai konteks yang berinteraksi secara langsung dengan perkembangan anak. Dalam konteks pendidikan inklusif, kondisi lingkungan fisik sekolah menjadi bagian penting dari *microsystem* karena dapat mendukung atau membatasi kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Lingkungan sekolah yang belum aksesibel berpotensi membatasi mobilitas, kemandirian, dan partisipasi anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh kompetensi guru dan adaptasi pembelajaran, tetapi juga memerlukan dukungan lingkungan fisik yang aksesibel dan responsif terhadap kebutuhan seluruh peserta didik. Kajian sistematis terhadap pengalaman peserta didik dengan disabilitas fisik turut menegaskan bahwa hambatan aksesibilitas di lingkungan sekolah reguler dapat diatasi melalui penyesuaian rancangan kurikulum dan dukungan fasilitas yang memadai (Sedlackova dkk., 2025). Temuan serupa mengenai keterbatasan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas juga ditemukan pada jenjang pendidikan tinggi, yang menunjukkan bahwa hambatan infrastruktur bersifat lintas jenjang pendidikan (Soleh, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang saling berkaitan. Faktor pendukung utama meliputi komitmen guru dan kepala sekolah, dukungan pemerintah daerah, kolaborasi antara sekolah dengan orang tua dan tenaga profesional, budaya sekolah yang inklusif, serta adanya regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sebaliknya, faktor penghambat yang masih dominan meliputi keterbatasan guru pendamping khusus, minimnya anggaran, belum memadainya fasilitas fisik, serta belum adanya instrumen evaluasi implementasi pendidikan inklusif yang baku. Komitmen guru menjadi faktor yang paling menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Guru yang memiliki sikap positif terhadap keberagaman cenderung lebih terbuka dalam menerima anak berkebutuhan khusus dan lebih kreatif dalam menyusun pembelajaran yang adaptif. Komitmen tersebut diperkuat oleh dukungan kepala sekolah melalui supervisi akademik, pemberian kesempatan mengikuti pelatihan, serta penyediaan kebijakan internal yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan sekolah dalam membangun budaya organisasi yang inklusif. Temuan ini memperkuat bukti bahwa persepsi dan praktik kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif (DeMatthews dkk., 2020), bahwa kepala sekolah berperan penting dalam mendorong budaya sekolah yang inklusif menurut perspektif guru (Khaleel dkk., 2021), bahwa peran kepala sekolah dalam konteks pendidikan dasar di

Indonesia turut menentukan efektivitas kebijakan pendidikan inklusi di tingkat sekolah (Muslimin & Muqowam, 2021), serta bahwa praktik kepemimpinan transformasional dan instruksional kepala sekolah memengaruhi kualitas perencanaan pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus (Lambrecht dkk., 2020). Selain peran kepala sekolah, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar turut bergantung pada penguatan kebijakan operasional dan dukungan sumber daya dari dinas pendidikan daerah, mengingat implementasinya di lapangan masih menghadapi kesenjangan antara kebijakan dan praktik (Iswanto, 2025).

Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan tenaga profesional juga menjadi faktor penting. Pendidikan inklusif tidak dapat dilaksanakan hanya oleh guru, tetapi memerlukan keterlibatan orang tua, psikolog, terapis, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut memungkinkan sekolah memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan peserta didik sehingga layanan yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran. Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan inklusif merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas disiplin antara guru, orang tua, dan tenaga profesional pada jenjang PAUD masih memerlukan penguatan agar layanan bagi anak berkebutuhan khusus lebih optimal (Sun dkk., 2026), sebagaimana juga ditemukan bahwa kolaborasi antara penyedia layanan pengasuhan anak dan tenaga profesional intervensi dini masih bersifat minimal meskipun interaksi telah berlangsung (Weglarz-Ward dkk., 2020). Kajian tren penelitian mengenai konseling dalam pendidikan inklusif di Indonesia turut menegaskan meningkatnya perhatian terhadap penguatan praktik bimbingan konseling, pelatihan guru, dan dukungan bagi peserta didik dalam konteks pendidikan inklusif (Amanah, 2024). Tinjauan cakupan terhadap pengalaman guru dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif turut menegaskan bahwa dukungan kolaboratif menjadi salah satu penentu utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan (Chigwenembe, 2026). Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan guru pendamping khusus (GPK) masih menjadi hambatan utama. Sebagian besar lembaga PAUD swasta belum memiliki GPK sehingga seluruh tanggung jawab pembelajaran berada pada guru kelas. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja guru meningkat dan berdampak pada kurang optimalnya pelayanan individual kepada anak berkebutuhan khusus. Hambatan lain yang masih ditemukan adalah keterbatasan anggaran sehingga sekolah mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas pembelajaran adaptif, media khusus, maupun mengikuti pelatihan secara berkelanjutan. Selain itu, belum adanya instrumen evaluasi yang terstandar menyebabkan sekolah belum memiliki ukuran yang jelas dalam menilai keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Kondisi ini sejalan dengan temuan evaluasi program pendidikan inklusif di sekolah dasar yang juga mengungkapkan lemahnya mekanisme evaluasi sebagai salah satu kendala utama keberhasilan implementasi kebijakan (Juhri, 2022). Evaluasi selama ini masih berfokus pada capaian pembelajaran peserta didik, sedangkan aspek kesiapan sekolah, kualitas layanan, aksesibilitas, dan kepuasan orang tua belum diukur secara sistematis. Akibatnya, proses perbaikan implementasi kebijakan berlangsung secara parsial dan belum berbasis data evaluasi yang komprehensif. Keterbatasan anggaran yang ditemukan dalam penelitian ini juga sejalan dengan kajian sistematis mengenai model pendanaan pendidikan khusus yang menegaskan bahwa alokasi pembiayaan yang memadai menjadi prasyarat penting bagi pemerataan layanan pendidikan inklusif (Swärd & Ramberg, 2026).

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada lembaga PAUD swasta di Kecamatan Sangatta Utara telah menunjukkan arah yang positif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya manusia, pembiayaan, penyediaan fasilitas, serta sistem evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat agar implementasi kebijakan pendidikan inklusif mampu memberikan layanan pendidikan yang setara, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh anak tanpa diskriminasi.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada lembaga PAUD swasta di Kecamatan Sangatta Utara telah mulai dilaksanakan melalui berbagai strategi, yaitu peningkatan kompetensi guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus (ABK), pelaksanaan pelatihan dan pengembangan profesional guru, penyesuaian materi pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi, serta upaya penyediaan dan evaluasi fasilitas pendukung pendidikan inklusif. Keempat aspek tersebut telah diterapkan pada seluruh lembaga yang menjadi lokasi penelitian, namun tingkat implementasinya belum sepenuhnya optimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, belum meratanya kompetensi guru, serta keterbatasan dukungan sumber daya sehingga pelaksanaan kebijakan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan layanan pendidikan inklusif secara maksimal. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif meliputi komitmen dan sikap positif guru, dukungan kepala sekolah dan lembaga pendidikan, kolaborasi antara guru, orang tua, serta tenaga profesional, pola pikir yang positif terhadap anak berkebutuhan khusus, dan adanya regulasi pemerintah yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sebaliknya, faktor penghambat yang masih ditemukan adalah terbatasnya guru pendamping khusus (GPK), keterbatasan anggaran, belum tersedianya instrumen evaluasi implementasi pendidikan inklusif yang baku, serta minimnya fasilitas dan sarana pendukung pembelajaran yang aksesibel. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada komitmen sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan, pendanaan, dan kolaborasi berbagai pihak secara berkelanjutan.

Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, diperlukan penguatan implementasi kebijakan pendidikan inklusif melalui penyediaan program pelatihan yang berkelanjutan bagi guru PAUD, penambahan tenaga pendamping khusus, penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, serta penyusunan sistem evaluasi yang terstandar untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan merata pada seluruh lembaga PAUD swasta. Bagi kepala sekolah, diharapkan terus memperkuat komitmen dalam membangun budaya sekolah yang inklusif melalui peningkatan kompetensi guru, pelaksanaan supervisi yang berkelanjutan, pengembangan pembelajaran berdiferensiasi, serta membangun kolaborasi yang lebih intensif dengan orang tua, tenaga profesional, dan masyarakat. Kepala sekolah juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia sehingga layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, dapat berlangsung secara lebih optimal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian yang berfokus

pada evaluasi efektivitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif dengan cakupan wilayah yang lebih luas, mengembangkan model pembelajaran maupun model manajemen pendidikan inklusif yang sesuai dengan karakteristik PAUD, serta mengkaji pengaruh kolaborasi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan tenaga profesional terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian lanjutan diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif sebagai dasar pengembangan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia.

6. Daftar Pustaka

Ainscow, M. (2020). Inclusion and equity in education: Making sense of global challenges. *Prospects, 49*(3–4), 123–134. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09506-w

Amanah, S. (2024). Tren penelitian konseling dalam pendidikan inklusif di Indonesia: Analisis konten. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 7*(2), 83–90. https://doi.org/10.24014/ittizaan.v7i2.32033

Arriani, F., Agustiyawati, Rizki, A., Widiyanti, R., Wibowo, S., Herawati, C. T. F., & Maryanti, T. (2022). *Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Bani Odeh, K., & Lach, L. M. (2024). Barriers to, and facilitators of, education for children with disabilities worldwide: A descriptive review. *Frontiers in Public Health, 11*, Article 1294849. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1294849

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.

Chigwenembe, P. (2026). Teachers' experiences in implementation of inclusive education for learners with special needs: A scoping review. *Cogent Education, 13*(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2026.2683212

DeMatthews, D. E., Serafini, A., & Watson, T. N. (2020). Leading inclusive schools: Principal perceptions, practices, and challenges to meaningful change. *Educational Administration Quarterly, 57*(1), 3–48. https://doi.org/10.1177/0013161X20913897

Fatmawiyati, J., & Permata, R. S. R. E. (2023). Implementasi pendidikan inklusif di PAUD. *Flourishing Journal, 2*(8), 567–582. https://doi.org/10.17977/um070v2i82022p567-582

Hardy, I., & Woodcock, S. (2023). Inclusive education policies – objects of observance, omission, and obfuscation: Ten years on. *International Journal of Inclusive Education, 28*(13), 3234–3252. https://doi.org/10.1080/13603116.2023.2257697

Insiatun, Karya, G., Ediyanto, & Sunandar, A. (2021). Implementasi pendidikan inklusi pada jenjang PAUD. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan, 1*(11), 873–878. https://doi.org/10.17977/um065v1i112021p873-878

Irmawati, Rahmawati, R., & Rusliandy. (2024). Implementasi kebijakan pendidikan inklusif jenjang sekolah dasar. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 9*(1), 168–184. https://doi.org/10.25077/jakp.9.1.168-184.2024

Iswanto, D. (2025). Pengarusutamaan pendidikan bagi penyandang disabilitas: Implementasi kebijakan sekolah dasar inklusif di Kota Malang. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 18*(1). https://doi.org/10.24832/jpkp.v18i1.1092

Juhri. (2022). Evaluasi program pendidikan inklusif pada sekolah dasar. *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan, 2*(4), 425–431. https://doi.org/10.51878/manajerial.v2i4.1916

Khaleel, N., Alhosani, M., & Duyar, I. (2021). The role of school principals in promoting inclusive schools: A teachers' perspective. *Frontiers in Education, 6*, Article 603241. https://doi.org/10.3389/feduc.2021.603241

Komabu-Pomeyie, S. (2023). The challenges and factors facilitating the inclusive education policy implementation in Ghana: Policy stakeholders' perspectives. *International Journal of Disability, Development and Education, 71*(7), 1094–1115. https://doi.org/10.1080/1034912X.2023.2283040

Lambrecht, J., Lenkeit, J., Hartmann, A., Ehlert, A., Knigge, M., & Spörer, N. (2020). The effect of school leadership on implementing inclusive education: How transformational and instructional leadership practices affect individualised education planning. *International Journal of Inclusive Education, 26*(9), 943–957. https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1752825

Langelaan, B. N., Gaikhorst, L., Smets, W., & Oostdam, R. J. (2024). Differentiating instruction: Understanding the key elements for successful teacher preparation and development. *Teaching and Teacher Education, 140*, Article 104464. https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104464

Mendoza, M. E., & Heymann, J. (2022). Implementation of inclusive education: A systematic review of studies of inclusive education interventions in low- and lower-middle-income countries. *International Journal of Disability, Development and Education, 71*(3), 299–316. https://doi.org/10.1080/1034912X.2022.2095359

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Muslimin, L., & Muqowam, M. (2021). Peran kepala sekolah terhadap kebijakan pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran, 7*(3), 708–718. https://doi.org/10.33394/jk.v7i3.3468

Nelis, P., Pedaste, M., & Šuman, C. (2023). Applicability of the model of inclusive education in early childhood education: A case study. *Frontiers in Psychology, 14*, Article 1120735. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1120735

Noble, H., & Heale, R. (2019). Triangulation in research, with examples. *Evidence-Based Nursing, 22*(3), 67–68. https://doi.org/10.1136/ebnurs-2019-103145

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Raniyah, Q., & Masitah, W. (2025). Evaluasi PAUD inklusif dengan model CIPP. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 9*(5), 1468–1478. https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i5.7009

Saidah, S. A., Muthmainnah, N., & Zulfadewina. (2025). Peran pendidik dan kebijakan sekolah bagi anak berkebutuhan khusus sekolah dasar negeri. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2*(2), 1–11. https://doi.org/10.47134/pgsd.v2i2.1404

Schaub, S., & Lütolf, M. (2023). Attitudes and self-efficacy of early childhood educators towards the inclusion of children with disability in day-care. *European Journal of Special Needs Education, 39*(2), 185–200. https://doi.org/10.1080/08856257.2023.2200106

Sedlackova, D., Kantor, J., & Belkin, L. (2025). The experiences of students with physical disabilities in inclusive education: A qualitative systematic review. *Educational Research Review*, Article 100715. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2025.100715

Soleh, A. (2016). *Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap perguruan tinggi: Studi kasus di empat perguruan tinggi negeri di Yogyakarta*.

Sudarto, Z. (2016). Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik, 1*(1), 97–106. https://doi.org/10.26740/jp.v1n1.p97-106

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sun, Y., Skouteris, H., Tamblyn, A., Berger, E., & Blewitt, C. (2026). Cross-disciplinary collaboration supporting children with special educational needs in early childhood education: A scoping review. *Early Childhood Education Journal, 54*(1), 381–398. https://doi.org/10.1007/s10643-024-01836-0

Swärd, A. M., & Ramberg, J. (2026). Funding special education for equity: A systematic review on funding models for special education. *European Journal of Special Needs Education*. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/08856257.2025.2611287

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Utari, D. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Juara Kota Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, 9*(2), 175–188. https://doi.org/10.21831/sakp.v9i2.17047

Verma, A., Koharey, R. K., & Verma, K. (2023). Education: Meaning, definition & types. In *Agriculture extension education* (pp. 1–6). S. R. Scientific Publication.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Wang, L., Lei, Y., Zhou, Q., & Wei, Y. (2025). Impact of inclusive education on early childhood development: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Inclusive Education, 30*(2), 374–389. https://doi.org/10.1080/13603116.2025.2449848

Weglarz-Ward, J. M., Santos, R. M., & Hayslip, L. A. (2020). How professionals collaborate to support infants and toddlers with disabilities in child care. *Early Childhood Education Journal, 48*(5), 643–655. https://doi.org/10.1007/s10643-020-01029-5

Wijaya, H. (2018). *Ringkasan dan ulasan buku analisis data penelitian kualitatif (Prof. Burhan Bungin)*, 1–45.

Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi: Teori, proses, dan studi kasus komparatif*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Yada, A., Leskinen, M., Savolainen, H., & Schwab, S. (2022). Meta-analysis of the relationship between teachers' self-efficacy and attitudes toward inclusive education. *Teaching and Teacher Education, 109*, Article 103521. https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103521

Zabeli, N., & Gjelaj, M. (2020). Preschool teacher's awareness, attitudes and challenges towards inclusive early childhood education: A qualitative study. *Cogent Education, 7*(1), Article 1791560. https://doi.org/10.1080/2331186X.2020.1791560

Ziernwald, L., Hillmayr, D., & Holzberger, D. (2022). Promoting high-achieving students through differentiated instruction in mixed-ability classrooms—A systematic review. *Journal of Advanced Academics, 33*(4), 540–573. https://doi.org/10.1177/1932202X221112931